

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila adalah lima asas yang dicanangkan oleh perumus<sup>1</sup> Pancasila pada bulan Juni 1945 guna menghadapi tuntutan-tuntutan pembentukan negara Islam dan untuk mempertemukan keragaman kultural di Republik Indonesia yang akan segera lahir kala itu. Secara garis besar lima asas yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan awal dari Pancasila adalah untuk memberikan dasar bersama bagi penegakan suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur<sup>2</sup> dibekas wilayah Hindia Belanda.

Para perumus Pancasila pada waktu itu mencita-citakan sebuah negara yang diharapkan akan cocok untuk semua bangsa Indonesia, tanpa memandang agama, etnisitas atau daerah. Usulan untuk menyatakan Islam sebagai dasar untuk republik yang baru ini dianggap memecah belah oleh para pemimpin golongan nasionalis. Karena itu Pancasila merupakan pernyataan nilai-nilai

---

<sup>1</sup>Diantara para perumus Pancasila ialah Soekarno, M.Yamin dan Soepomo. Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 21.

<sup>2</sup>Pembukaan UUD 1945, Alenia 2-4.

universal, yang dengan cerdas dijalin oleh para perumus dari sumber-sumber pribumi, agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai sosial yang terpenting dari Pancasila adalah toleransi, terutama dalam masalah agama. Pancasila berhasil meyakinkan kaum nasionalis sekuler, baik yang beragama Islam maupun tidak, bahwa negara baru ini tidak akan memprioritaskan Islam diatas lainnya. Sebaliknya, Pancasila menyatakan bahwa meski Indonesia secara filosofis didasarkan pada agama, negara tidak berpihak pada salah satu agama dan menempatkan secara setara semua agama. Kompromi politis ini berarti bahwa pemerintah menghormati keberagaman agama rakyatnya.<sup>3</sup>

Pancasila merupakan sumber nilai dan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma hukum oleh negara. Dengan demikian Pancasila sebagai sumber hukum harus menjiwai, menentukan nilai isi hukum positif Indonesia dan bahkan lebih dari itu harus menjiwai pula sasaran, tujuan dan pelaksanaan hukum positif. Namun Pancasila tidak hanya sekedar empat bergantungnya hukum, akan tetapi harus dilihat pada materi dan isi yang terkandung pada peraturan hukum itu. Jadi secara materiil isinya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila.<sup>4</sup>

Menjelang akhir tahun 1950-an Pancasila tidak lagi merupakan suatu kompromi atau titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana dimaksudkan semula oleh Soekarno. Hal ini karena Pancasila telah semakin dimanfaatkan

---

<sup>3</sup>Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 3.

<sup>4</sup>Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 12.

sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Soekarno sendiri memakai Pancasila sebagai senjata ideologis dalam suatu pidato yang menimbulkan kecemasan umat Islam dan perasaan anti-Pancasila.

Di tengah-tengah krisis tahun 1957, diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan Demokrasi Terpimpin. Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus mengalami perubahan sepanjang awal sejarah Indonesia. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya ia ambil bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata.<sup>5</sup> Pada demokrasi Terpimpin ini banyak terjadi gerakan pemisahan diri di berbagai daerah dan serangkaian pemberontakan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh beberapa kelompok Islam yang kecewa karena tuntutan mereka menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tidak diindahkan oleh pemerintah, gerakan ini terjadi pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno.

Keadaan ini diperparah oleh peristiwa 30 September 1965 atau G 30 S yang dilakukan oleh Kolonel Untung, yang merupakan komponen Cakrabirawa dan disinyalir melibatkan PKI, membuat pemerintahan Soekarno semakin menuju ambang kehancuran. Jaringan sistem politik Demokrasi Terpimpin yang menampilkan pilar kekuatan politik berpusat pada Soekarno, militer dan PKI

---

<sup>5</sup>M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj. Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: Serambi, 2010), 533.

akhirnya memudar. Interaksi konfrontasi diantara pilar-pilar itu tidak bisa dipertahankan. Drama peristiwa September 1965 yang gagal ini, telah membawa perubahan-perubahan besar dan berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan antara presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto yang memperoleh surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).<sup>6</sup>

Panglima kostrad, letnan Jenderal Soeharto, muncul sebagai perwira paling senior dalam penumpasan percobaan kudeta tersebut. Soeharto menghadapi menegakkan masalah legitimasi ketika kekuasaan sedikit demi sedikit diambil alih dari Soekarno pada akhir 1965 dan awal 1966. Keharusan Soeharto adalah untuk meyakinkan bahwa rezim baru ini adalah pewaris yang sah dan konstitusional dari presiden pertama. Dari khazanah ideologis Soekarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk meligitimasi kekuasaannya. Soeharto dan para pendukungnya akhirnya menamakan pemerintah warisan mereka ini sebagai “Orde Baru” dan menjelang 1967 telah melancarkan reorientasi kebijakan-kebijakan ekonomi, politik dan hubungan luar negeri.

Pendukung utama Soeharto dalam pemerintahannya adalah pihak militer, Tentara Nasional Indonesia memandang legitimasinya berasal dari tugasnya sebagai pembela negara Pancasila sebuah negara kesatuan yang nonkomunis dan juga non Islam. Upaya-upaya yang didukung militer untuk mendasarkan legitimasi pemerintahan Orde Baru Soeharto pada Pancasila itu konsisten dengan

---

<sup>6</sup>Kacung Marijan, *Quo Vadis NU; Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 87.

sejarah dan ideologi dari angkatan bersenjata. Terutama ABRI mengemukakan kewajibannya untuk meluruskan “penyimpangan-penyimpangan” dari Pancasila yang terjadi di bawah Soekarno dan demokrasi parlementer periode tahun 1950-an.<sup>7</sup>

Proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto tidak hanya mendapat dukungan dari kekuatan militer, namun juga organisasi politik maupun kemasyarakatan. Salah satu diantaranya yaitu Nahdlatul Ulama (NU). NU memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap setelah dalam beberapa hari saja Jenderal Soeharto berhasil menumpas G 30 S. Di samping keikutsertaan para aktivis radikalnya dalam demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di tahun 1966, NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh jenderal Soeharto. Bagi para jenderal yang menekankan keabsahan peralihan kekuasaan, NU merupakan satu-satunya pasangan yang dapat dijadikan tumpuan harapan. Partai Nasional terlalu dekat hubungannya dengan Soekarno, Masyumi menjadi partai yang terlarang tahun 1960 dan diawasi pemerintah, sementara partai-partai lainnya terlalu kecil untuk berperan.<sup>8</sup>

Peran NU ditunjukkan dengan usulan memorandum kepada DPRGR yang menyerukan agar mengajukan usul kepada MPRS untuk mengadakan sidang istimewa yang berisi:

---

<sup>7</sup>Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia*, 39.

<sup>8</sup>Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara*, Terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), 95.

1. Memberhentikan presiden Soekarno dari jabatannya dan mengangkat pejabat presiden sesuai dengan pasal 3 ketetapan MPRS NO. XV/MPRS/1966.
2. Memerintahkan kepada Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengusutan pemeriksaan dan penuntutan secara hukum kepada Soekarno.<sup>9</sup>

Sementara itu kedudukan jenderal Soeharto semakin kuat untuk menjadi pejabat presiden RI dengan adanya legitimasi dari MPRS, dan memberhentikan presiden Soekarno melalui Ketetapan NO. XXXIII/MPRS/ 1967 dan diangkatnya Jenderal Soeharto menjadi presiden RI pada Maret 1968 sebagai presiden penuh.

Orde Baru memfokuskan pada pemurnian Pancasila dan meletakkannya sebagai pilar ideologis rezim. Pancasila kini sepenuhnya menjadi suatu pembenaran ideologis untuk kelompok yang berkuasa, tidak lagi hanya merupakan suatu platform bersama dimana semua ideologi bisa dipertemukan. Orde Baru mengklaim dirinya sebagai suatu orde atau tatanan pemerintahan yang tampil sebagai kekuatan pengoreksi total terhadap rezim Orde Lama dan hendak melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuaen.

Pemerintah Orde Baru memandang penyelewengan-penyelewengan (terutama terhadap UUD 1945 dan Pancasila) yang banyak terjadi pada masa Orde Lama sebenarnya bersumber dari kenyataan tidak diamalkannya Pancasila secara sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat kenyataan ini timbullah keinginan dan ide dari

---

<sup>9</sup>Marijan, *Quo Vadis NU*, 92.

pemerintah Orde Baru untuk menjabarkan Pancasila dalam bentuk rumusan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan diprakarsai oleh presiden Soeharto sendiri, akhirnya P-4 pada tahun 1978 berhasil dirumuskan dan rumusan ini disahkan oleh sidang MPR melalui ketetapan MPR NO.11/1978. P-4 dimaksudkan sebagai penjabaran dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila sebagaimana tercermin dalam P-4 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

Setelah berhasil dengan kebijakannya dalam merealisasikan dan memasyarakatkan P-4, pemerintah Orde Baru melangkah lebih jauh dengan menempuh kebijakan baru yang lebih signifikan dan lebih strategis dalam rangka untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diambil sebelumnya. *Pertama*, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik dan Golkar. *Kedua*, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan.

Gagasan asas tunggal ini menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun sampai diundangkan dalam UU NO.5/1985 dan UU No.8/1985. Pendaftaran kembali ormas-ormas yang harus sesuai dengan UU NO.8/1985, diberi batas terakhir tanggal 17 juli 1987. Ormas yang tidak menerima asas tunggal tidak

---

<sup>10</sup>Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI Yogya, 2002), 50-51.

akan didaftarkan dengan konsekuensi dibubarkan. Secara umum reaksi kalangan Islam mengenai pemberlakuan asas tunggal Pancasila ada tiga macam yaitu:

1. Menerima secara total tanpa kritik
2. Menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU keormasan, dan
3. Menolak sama sekali.

Golongan yang pertama adalah PPP, NU, Perti, dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil, seperti dewan masjid Indonesia. Golongan yang kedua antara lain Muhamadiyah dan HMI. Sedangkan yang ketiga adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh Islam antara lain Deliar Noer, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, serta para muballigh yang secara terbuka melalui acara pengajian menyatakan ketidaksetujuannya terhadap asas tunggal.<sup>11</sup>

Pemberlakuan asas tunggal Pancasila menimbulkan pergulatan internal yang saling berbeda di kalangan ormas Islam terutama dua ormas Islam yaitu NU dan Muhamadiyah. Dibanding dengan Muhamadiyah, penerimaan terhadap penetapan asas tunggal Pancasila bagi NU relatif lancar.

Jauh sebelum disahkan UU keormasan, NU telah menetapkan asas Pancasila dalam munasnya di Situbondo, sehingga untuk menyelenggarakan muktamar ke-27 tidak lagi harus menunggu UU itu disahkan. Kelancaran penetapan asas ini antara lain disebabkan oleh konsentrasi kepemimpinan NU

---

<sup>11</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 265-266.

pada pengurus besarnya, kemudian diperkuat lagi melalui restu sesepuh NU KH. As'ad Syamsul Arifin.<sup>12</sup>

NU yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344/31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah, mempunyai tujuan awal yaitu untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut mazdhab empat di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU menjadi sebuah gerakan yang meliputi semua dimensi kehidupan yang mengarah kepada *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur* (terwujudnya suatu negara yang aman, makmur dan mendapat pengampunan dari Tuhan).<sup>13</sup>

NU mempunyai pengaruh yang cukup kuat pada pemerintahan sejak awal pendiriannya. Sampai pada tahun 1952 NU berubah menjadi partai politik setelah keluar dari Masyumi. Berubahnya NU yang semula sebagai organisasi keagamaan menjadi organisasi politik ternyata tidak selamanya menguntungkan. Fungsi utamanya sebagai pengayom umat berubah paradigma sebatas berorientasi pada politik. NU sebagai organisasi besar dimanfaatkan oleh elit-elit NU yang hanya mempunyai kepentingan politik oportunistik.<sup>14</sup> Namun pada pertengahan Orde Baru yaitu pada tahun 1983 NU memutuskan untuk kembali ke

---

<sup>12</sup>Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru; Perubahan Politik dan Keagamaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 10.

<sup>13</sup>Harun Nasution et al, *Ensiklopedi Islam 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 345-346.

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik & Jonaedi Efendi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 8.

khittah 1926 yaitu sebagai organisasi sosial keagamaan bukan lagi sebagai organisasi politik. Keputusan ini diperoleh pada saat Munas Alim Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Safiiyah, Sukorejo, Situbondo, 18-21 Desember 1983. Selain membicarakan mengenai kembalinya NU pada khittah Munas tersebut juga mengagendakan penerimaan NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila.

NU menjadi organisasi keagamaan yang pertama kali menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena NU sebagai organisasi keagamaan bukan lagi organisasi politik justru dengan cepat menerima Pancasila sebagai asas tunggal, tidak seperti organisasi lain yang masih membutuhkan waktu yang lama untuk menerima bahkan ada beberapa yang menyatakan menolak. Oleh karena itu penelitian mengenai respon NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila menjadi menarik adanya untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberlakuan asas tunggal Pancasila di Indonesia oleh pemerintah Orde Baru?
2. Bagaimana dinamika NU pada masa Orde Baru?
3. Bagaimana respon NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat diketahui berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru
2. Untuk mengetahui dinamika NU pada masa Orde Baru
3. Untuk mengetahui respon NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah Orde Baru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan sejarah perpolitikan Islam Indonesia, terutama mengenai respon Nahdlatul Ulama terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan penelitian di perpustakaan Fakultas Adab dan perpustakaan pusat UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **E. Pendekatan Dan Kerangka Teoritik**

Sesuai dengan judul di atas maka pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan kesejarahan yang memiliki ciri khas adanya model diakronis, yaitu pengungkapan sejarah yang menawarkan bukan hanya struktur dan fungsinya yang berdialektik dengan melihat realitas sejarah serta mengedepankan

pengungkapan peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu. Pendekatan historis dijadikan penulis untuk mengungkapkan apa yang melatarbelakangi pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi sosial politik dan organisasi masyarakat pada masa Orde Baru tahun 1985, serta mengungkapkan respon yang ditunjukkan oleh NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang tentunya mempunyai pengaruh yang cukup kuat baik pada masyarakat maupun pada pemerintahan terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila.

Studi sejarah memiliki corak interdisipliner dalam operasional studinya. Corak interdisipliner studi sejarah membuat keterlibatan disiplin keilmuan lain untuk turut serta memberikan kerangka analisis terhadap fenomena-fenomena sejarah yang sedang dikaji. Keterlibatan disiplin ilmu lain tersebut sangat penting dijadikan pisau analisis agar kajian sejarah dapat lebih kritis, komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori politik sebagai pisau analisisnya. Teori yang diterapkan penulis adalah sebuah teori yang diderivasikan oleh John B. Watson yaitu teori Behavioralisme.

Teori politik behavioralisme merupakan salah satu model analisis politik yang menjadikan tingkah laku politik baik individu maupun kelompok sebagai fokus perhatian yang utama. Selain itu, perhatian utama paham behavioralisme terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Sebagai pendekatan yang fokus pada tingkah laku politik individu dan kelompok,

behavioralisme juga memperhatikan hubungan individu dan kelompok. Mempelajari bagaimana dan mengapa afiliasi-afiliasi kelompok yang luas, seperti kelas, wilayah pekerjaan, pendapatan, agama, etnis dan sebagainya membentuk keyakinan, sikap dan ide.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi fokus behavioral tidak semua tingkah laku politik individu atau kelompok melainkan hanya terbatas pada mereka yang mempunyai pengaruh di masyarakat. NU merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat sehingga tingkah laku politik yang dilakukannya banyak berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat terutama masyarakat Islam. Tidak terkecuali pada saat pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada Orde Baru.

Penulis berusaha mengungkap bagaimana NU dapat menerima pemberlakuan asas tunggal Pancasila dengan cukup mudah tidak seperti organisasi lain yang membutuhkan waktu beberapa tahun setelah diundangkan pemberlakuan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi sosial politik dan ormas<sup>16</sup> dengan menggunakan teori behaviorisme ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari duplikasi dan kesamaan dalam pembahasan penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu.

Penulis dapatkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1988), 209-210.

<sup>16</sup>Thaba, *Islam dan Negara*, 267.

1. Resolusi Jihad NU (Abdullah Muzakki, 2003) membahas tentang munculnya perlawanan NU yang terkoordinasi dalam satu fatwa jihad revolusi terhadap para imperialis yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari khususnya terjadi di kota Surabaya dengan kekuatan laskar Hizbullah dan Sabillah yang tergabung dari setiap daerah di Jawa Timur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2. Ijtihad Politik Nahdlatul Ulama Era Orde Baru (1967-1984) (Muhammad Mujahiddin, 2007) membahas tentang peran serta tingkah laku NU dalam perpolitikan di Indonesia era Orde Baru khususnya sekitar tahun 1967 sampai tahun 1984 yaitu dimulai dari pendirian partai NU 1952 hingga menjadi oposisi terhadap Orde Baru dengan menentang beberapa kebijakan pemerintah.
3. Respon Muhammadiyah terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila (Siti Fatonah, 2005) membahas tentang respon yang diberikan Muhammadiyah ketika Orde Baru memberlakukan asas tunggal untuk semua organisasi baik sosial keagamaan maupun politik. Muhammadiyah tidak begitu saja menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. Ia menunggu adanya UU Keormasan sebelum menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai respon NU terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila belum ada, meskipun telah ada pembahasan mengenai pemberlakuan asas tunggal namun itu terbatas pada Muhammadiyah, salah satu organisasi terbesar kedua

setelah NU. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi ruang yang masih tersedia untuk studi tentang NU dan studi tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang berjudul “NU Pada Masa Orde Baru; Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila” belum pernah dilakukan sebagai bahan tulisan termasuk sebagai skripsi.

## **G. Metode Penelitian**

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lampau yang terkait pada prosedur penelitian ilmiah.<sup>17</sup> Dengan demikian untuk memperoleh sejarah yang ilmiah maka diperlukan metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah, karena objek dari penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau.<sup>18</sup> Upaya dalam mendapatkan data yang valid dari objek yang diteliti dapat ditempuh dengan melalui langkah-langkah dalam penelitian sejarah dengan empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>19</sup>

### **1. Heuristik**

Heuristik yaitu teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah atau data sejarah, baik menghimpun data melalui sumber secara tertulis maupun sumber lisan yang relevan. Sumber tertulis diperoleh dari

---

<sup>17</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), 18.

<sup>18</sup>Louis Guotsohalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1995), 32.

<sup>19</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1991), 72.

buku-buku atau majalah, koran dan sebagainya. Sedangkan sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan saksi sejarah yang mengetahui peristiwa sejarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengupulkan data dari literatur yang ada dengan cara menelaah isinya. Penulis dalam teknik ini mencari sumber-sumber berupa data tertulis berupa dokumen, arsip serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

## 2. Verifikasi atau Kritik

Yaitu melakukan penelitian tentang keaslian dan kredibilitas sumber, melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstren atau otentitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data. Hal ini dilakukan untuk menyeleksi segi-segi fisik dari sumber data tersebut, sehingga diperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan data yang tepat. Kritik intern atau kredibilitas dilakukan untuk meneliti kebenaran isi data. Dengan dengan kritik ini akan didapatkan tingkat kebenaran isi sumber yang dipergunakan. Oleh karena itu, kritik dilakukan sebagai alat pengendalian atau proses-proses itu serta untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain kritik intern yaitu mencari keaslian sumber dari aspek materi (otentitas sumber) dan kritik ekstern yaitu suatu cara pengujian yang dilakukan terhadap aspek luar dari sumber sejarah yang digunakan atau mencari kredibilitas sumber sejarah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 130.

### 3. Interpretasi dan analisis sumber

Interpretasi ialah yaitu penafsiran data yang telah teruji kebenarannya. Dalam tahap ini dicoba untuk menafsirkan fakta sejarah dengan merangkai fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga muncul hubungan yang rasional antara data yang diperoleh dengan fakta yang ada.<sup>21</sup> Dalam menganalisis sumber, hal pertama yang dilakukan adalah, menyusun dan mendaftar semua sumber yang didapat. Selanjutnya penulis menganalisa sumber-sumber tersebut untuk mencari fakta-fakta yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian.

### 4. Historiografi

Yaitu penulisan hasil penelitian menjadi rekonstruksi sebuah cerita dengan mengorganisasikan materi, peletakan dasar pandangan dari sudut masa lalu. Penulisan dilakukan setelah didapatkan fakta-fakta yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah menuliskannya ke dalam bentuk tulisan deskriptif dengan menggunakan susunan bahasa dan format yang baik serta benar.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematikan penulisan, hal ini bertujuan agar mendapatkan susunan pembahasan yang terarah serta

---

<sup>21</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), 60.

memudahkan bagi para pembaca. Oleh karena itu sistematika penulisan skripsi akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### BAB I. Pendahuluan

Bab ini bertujuan mengantarkan secara sekilas, segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan skripsi, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknik penelitian. Pembahasan mengenai metodologi juga dikemukakan dengan mengambil beberapa teori sebagai landasannya.

#### BAB II. Pemberlakuan Asas Tunggal Di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Sebagai langkah awal pembahasan, dalam bab ini akan memberikan penjelasan mengenai kondisi pemerintahan Indonesia pada akhir Orde Lama hingga lahirnya Orde Baru yang Soeharto sebagai presiden, dengan berbagai kebijakannya Soeharto dan salah satunya yaitu memberlakukan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi baik sosial, politik maupun kemasyarakatan.

#### BAB III. NU Pada Masa Orde Baru

Bab ini akan mengkaji tentang dinamika NU pada masa Orde Baru yaitu yang awalnya sebagai organisasi politik dengan difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan namun kemudian keluar dari partai tersebut serta akan mengkaji pengaruh-pengaruh NU pada pemerintahan Orde Baru.

#### BAB IV. Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana respon NU atas pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah dan juga dasar-dasar penerimaan NU terhadap

Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila, serta respon organisasi lain sebagai pembanding dari respon yang diberikan NU.

#### BAB V. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran untuk lembaga dan masyarakat.